PENDEKATAN PENATAAN KELEMBAGAAN KAWASAN PERKOTAAN

Oleh : Drs. Joni Dawud, DEA

Perlunya penataan kelembagaan pengelola kawasan perkotaan dilatarbelakangi oleh kondisi yang ada dewasa ini dimana disatu sisi kawasan perkotaan tumbuh begitu cepat tanpa terkendali, di lain sisi pengelola kawasan perkotaan tidak dilakukan secara profesional oleh suatu lembaga tertentu yang memiliki otoritas memadai. Hal tersebut tidak mendapat pengaturan yang jelas dalam UU Nomor 22 tahun 1999 bahkan Kota Administratif yang bisa dikatakan salah satu bentuk kelembagaan pengelola kawasan perkotaan menurut UU 5 Tahun 1974 telah dihapuskan.

Pendahuluan

Sejalan dengan kemajuan perekonomian negara dan bangsa, Pembangunan yang telah dilakukan memunculkan kawasan-kawasan yang memiliki karakteristik perkotaan dimana aktivitas masyarakat tidak hanya tertumpu pada sektor pertanian atau perkebunan tetapi lebih banyak ke sektor jasa, industri dan perdagangan. Sehingga kawasan yang tadinya pedesaan (*rural*) telah berubah menjadi kawasan lebih bercirikan perkotaan (*urban*).

Perkembangan dan perubahan-perubahan tersebut tidak hanya berdampak positif tetapi juga negatif. Permasalahan perkotaan menjadi lebih kompleks dan complicated terhadap pengelolaan kawasan perkotaan. Tuntutan akan perumahan, sarana transportasi serta sarana dan parasarana kota lainnya meningkat, dilain pihak keterbatasan akan lahan menjadi persoalan yang pelik untuk diatasi pengelola kawasan perkotaan.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dan berkembangnya kondisi lingkungan dan masyarakat di kawasan perkotaan tersebut menimbulkan tuntutan akan kebutuhan penangan kawasan perkotaan yang lebih

serius dan terpadu mutlak di butuhkan guna mencegah dan mengatasi ekses-ekses yang timbul di kemudian hari. Pengelola kawasan perkotaan yang akan terbentuk diharapkan dapat mengatur dan mengarahkan pertumbuhan kawasan perkotaan kearah yang lebih terencana dan terpadu sehingga dapat memberikan fasilitas-fasilitas pelayanan yang baik terhadap warga kota dan mendorong berkembangnya berbagai kegiatan di bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik di kawasan tersebut ke arah yang lebih tertata dan terencana.

Dengan berlakunya UU 22 tahun 1999, dimana Kota administratif dihapuskan, bila memenuhi persyaratan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonom dan kalau tidak memenuhi persyaratan sebagai daerah Otonom akan dikembalikan ke bentuk semula yaitu diserahkan pada perangkat pemerintahan lainnya yaitu kecamatan (Pasal 125, UU 22/1999). Hal tersebut akan menimbulkan permasalahan bagaimana pengelolaan kawasan perkotaan dewasa ini, padahal pengelolaan kawasan perkotaan membutuhkan kewenangan dan keahlian tersendiri yang berbeda dengan mengelola kawasan lainnya. Walaupun UU 22 Tahun 1999 (Pasal 90 sampai dengan pasal

92) telah memberikan guide line pengelolaan kawasan perkotaan. Namun demikian pengaturan tersebut belum memberikan kejelasan kedudukan dan status kelembagaan pengelola kawasan perkotaan, aturan tersebut hanya mengatur dalam hal pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan, bagaimana pengelolaan kawasan perkotaan secara menyeluruhnya belum terlihat adanya kejelasan.

Kawasan Perkotaan

Sejalan dengan tumbuh dan berkembang kehidupan dan penghidupan masyarakat di Indonesia, Wilayah dimana masyarakat melaksanakan kehidupan mengalami perubahan dan perkembangan. Wilayah yang tadinya diwarnai dengan kehidupan perdesaan dimana masyarakat mayoritas kehidupan dan penghidupan dari sektor pertanian bergeser menjadi kawasan dimana sektor industri, jasa dan perdagangan menjadi yang dominan, sehingga tidak lagi mencerminkan kawasan perdesaan tapi telah berubah menjadi kawasan yang bercirikan perkotaan. Pertumbuhan kawasan perkotaan ini begitu cepat terutama di kawasan-kawasan sekitar kota-kota besar dan sedang, dan di wilayah industrialisasi seperti di kawasan pantai utara Jawa.

Kawasan-kawasan yang tumbuh menjadi perkotaan tersebut dilihat dari kewilayahan administratif dapat dibedakan sebagai berikut

1. Kawasan perkotaan yang telah dibentuk menjadi Daerah Kota biasanya pada masa-masa lampau Daerah tersebut pada awalnya memiliki status Kota Administratif yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten yang dengan perkembangan selanjutnya ditingkatkan menjadi Daerah Kota.
2. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian Daerah Kabupaten, bentuk kawasan

perkotaan ini dapat merupakan : kota administratif, sebuah kecamatan atau beberapa kecamatan misalnya Ibukota Kabupaten bahkan sebuah atau beberapa Desa misalnya ibukota kecamatan.

3. Kawasan Perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan. Ini merupakan Kawasan perkotaan yang tumbuh dari pembangunan proyek perumahan dengan skala besar yang berubah dari kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan misalnya Kota Bumi Serpong Damai, Lipo Cikarang dan lain sebagainya.
4. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih Daerah kabupaten atau Kota yang berbatasan sebagai suatu kesatuan sosial, ekonomi dan fisik perkotaan.

Dengan berkembangnya kehidupan dan pembangunan, Kawasan pedesaan (Desa) telah berubah menjadi kawasan perkotaan (Kota), perubahan tersebut menimbulkan implikasi terhadap berubahnya peran dan fungsi dari kawasan tersebut. Fungsi dan Peran Perkotaan akan jauh berbeda dengan Peran dan Fungsi Kawasan Pedesaan :

1. Kota sebagai pusat pemerintahan,
2. Kota berperan sebagai pusat perdagangan dan kegiatan perekonomian lainnya
3. Kota berperan sebagai pusat pendidikan
4. Kota berperan sebagai kawasan perumahan
5. Kota sebagai pusat pelayanan umum

Tekanan perubahan yang terjadi saat ini telah cenderung meruntuhkan nilai-nilai lama yang memunculkan nilai baru yang berbasis ilmu

pengetahuan dan teknologi yang secara bersamaan menciptakan peluang-peluang dan masalah-masalah baru. Berbagai perubahan yang kini sedang kita alami telah membawa implikasi yang luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terutama karena secara sadar atau tidak, sebagian dari fungsi pemerintahan pun telah bergeser. Keadaan seperti ini harus direspon dengan perubahan pola kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan tersebut di atas, penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi ini harus dilihat dalam konteks pengoptimalan penyelenggaraan fungsi-fungsi pokoknya yang meliputi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.

Pengelolaan Kawasan Perkotaan yang ada saat ini perlu ditingkatkan disebabkan kecenderungan-kecenderungan yang ada pada saat ini adalah:

1. Adanya pertumbuhan penduduk kawasan perkotaan yang sangat cepat terutama karena arus urbanisasi. Arus urbanisasi dari pedesaan ke perkotaan disebabkan antara lain kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang memberikan dukungan terhadap sektor pertanian, sehingga kehidupan dari pertanian tidak memberikan masa depan yang menggembirakan. Penduduk terutama kaum muda lebih memilih profesi lain dari pada jadi Petani yakni dengan urbanisasi ke Kota dengan pengharapan dapat memperbaiki kehidupan dan penghidupannya. Faktor lain yang menyebabkan urbanisasi yakni kesadaran untuk meningkatkan taraf pendidikan, sedangkan sarana-sarana pendidikan-pendidikan lanjutan hanya terletak di kawasan perkotaan.

2. Proses Industrialisasi yang mendorong perubahan struktur wilayah yang tadinya pedesaan dengan tumbuhnya industri telah merubah wajah wilayah tersebut menjadi kawasan perkotaan yang tentu saja menuntut penyediaan fasilitas-fasilitas perumahan, kesehatan, perdagangan dan fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya.
3. Dalam pengelolaan kawasan perkotaan diperlukan adanya keterpaduan antara berbagai kawasan/daerah, berbagai sektor dan subsektor, sehingga Pengelolaan dapat dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik. Tidak menimbulkan suatu kecenderungan untuk lebih mementingkan satu kawasan atau satu sektor saja, tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap kawasan/sektor lain.
4. Kecenderungan-kecenderungan di lapangan pengelolaan kawasan perkotaan tidak ditangani secara serius oleh Pemerintah Daerah, sehingga perkembangan kawasan perkotaan berkembang kearah kota yang semrawut, tidak tertata dan tidak teratur.
5. Secara struktural dan fungsional pengelolaan kawasan perkotaan dilakukan secara terpisah-pisah oleh beberapa instansi pemerintahan dengan menggunakan pendekatan didasarkan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Kelembagaan Pengelola Kawasan Perkotaan

Dengan semakin kompleksnya permasalahan perkotaan di masa yang akan datang, Tugas dan fungsi kelembagaan pengelola kawasan perkotaan pada masa yang akan datang harus lebih berperan dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum di kawasan Perkotaan. Sampai dengan

saat ini pengelolaan kawasan perkotaan masih mendasarkan pada UU 5 Tahun 1974 Pengelolaan kawasan perkotaan dilakukan oleh beberapa kelembagaan antara lain Pemerintah Kota administratif, Dinas PU baik Cipta Karya maupun Bina Marga, BAPPEDA, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Bangunan, Dinas Permukiman dan Penyehatan Lingkungan, dan Kecamatan.

Dengan tersebarnya pengelolaan kawasan perkotaan tersebut menimbulkan permasalahan kurang terintegrasinya Pengelolaan dan pembangunan Kawasan perkotaan. Kota-kota tumbuh tidak terencana dan tertata dengan baik. Kecamatan sebagai salah satu institusi yang memiliki wilayah kawasan perkotaan hanya bertugas dan berfungsi sebagai institusi dekonsentrasi Pemerintah Pusat yang menjalankan tugas dan fungsi lebih menangani hal-hal yang bersifat administrasi pemerintahan umum. Walaupun dalam kenyataannya dilapangan berperan pula melaksanakan tugas-tugas desentralisasi baik dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah daerah Kab./Kota.

Pemerintah kecamatan seringkali menghadapi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Pemerintah kecamatan menghadapi masalah keterbatasan biaya untuk menjalankan institusi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian pelayanan yang diberikan tidak optimal. Pendapatan daerah dan retribusi yang dipungut tidak sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah kecamatan bersangkutan melainkan hanya sebagian sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah pada tingkat di atasnya.
2. Pemerintah kecamatan menghadapi keterbatasan aparat ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini sangat mempe-

ngaruhi kemampuan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan perkotaan. Masalah ini sangat terasa terutama dalam menghadapi perkembangan kawasan perkotaan yang pesat.

3. Masyarakat perkotaan sangat dinamis dengan perubahan sosial-ekonomi yang sangat cepat. Perubahan tersebut seringkali kurang diantisipasi secara cepat dan tepat oleh pemerintah kecamatan setempat karena keterbatasan wewenang, biaya, maupun aparat.

Dengan semakin berkembangnya kawasan pedesaan yang menjadi kawasan perkotaan, model kelembagaan yang bertugas mengelola kawasan semestinya mengalami perubahan mengikuti kebutuhan dan tuntutan yang ada di masyarakat. Model pengelola kawasan perkotaan/kawasan khusus (special District) di Amerika Serikat mengalami perkembangan karena dirasakan untuk mengelola suatu kawasan yang spesifik dibutuhkan pola organisasi yang khusus yang berbeda dari pola organisasi biasanya. Munculnya pola-pola kelembagaan pengelola kawasan khusus, di Amerika Serikat disebabkan oleh :

1. Financial limitation
2. Limitations on the Powers of Local Government
3. Areal Convenience
4. Political Compromises
5. Desire for Business Management
6. Public Acceptance of Special Districts
7. Programs of higher levels of government
8. Influence of special interest groups
9. The desire for independence
10. Historical Circumstances

(Donal Foster Stetzer, 1975)

Upaya penataan organisasi dalam hal ini penentuan kelembagaan pengelola kawasan

perkotaan, agar kelembagaan yang dihasilkan sesuai dengan harapan yakni dapat mengelola kawasan perkotaan dengan efektif dan efisien, memerlukan satu pendekatan dan kajian yang lebih terintegralistik. Melalui suatu analisis, penelitian dan pengembangan yang matang dari beberapa aspek kelembagaan yang mendukung proses (administrasi) dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi.

Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan itu antara lain meliputi :

1. **Aspek Tujuan**

Kelembagaan yang dibentuk membutuhkan tujuan, mengapa lembaga tersebut ada. Kelembagaan tersebut dibentuk dengan tujuan menjadi Pengelola Kawasan Perkotaan

2. **Aspek Status,**

Aspek ini dimaksudkan, Kelembagaan yang akan dibentuk untuk mengelola kawasan perkotaan ini memiliki kejelasan status dan kedudukannya, Murni pemerintah, Semi Pemerintah atau Swasta Murni.

3. **Aspek Tugas Pokok dan Fungsi**

Adanya kejelasan tugas pokok dan fungsi yang diemban lembaga yang dibentuk dengan menetapkan *core businessnya*

4. **Aspek Wewenang**

Lembaga yang dibentuk harus dilengkapi dengan wewenang/otoritas yang jelas dan tegas sehingga memungkinkan lembaga tersebut menjalankan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya

5. **Aspek Struktur**

Lembaga tersebut memiliki struktur kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat

dilapangan tidak didasarkan pada kepentingan

6. **Aspek Hubungan Kerja**

Pengaturan tata hubungan kerja yang harmonis baik dalam intern kelembagaan tersebut maupun ekstern kelembagaan tersebut yaitu keterkaitan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat

7. **Pembiayaan atau Sumber keuangan**

Artinya organisasi yang sedang ditata tersebut harus jelas sumber keuangannya, baik berupa pajak, retribusi, subsidi pemerintah pusat dan lain-lain yang akan tercermin dalam APBD Tingkat II.

8. **Personalia**

Personil yang akan mengisi lembaga tersebut mau seperti apa dan dari mana, begitu juga halnya dengan status kepegawaianya, apakah Pegawai Negeri, Tenaga Kontrak yang Profesional atau Pegawai tetap lembaga tersebut.

Kedelapan aspek-aspek tersebut di atas, sebagai satu proses administrasi memiliki "*interpedensi*" yang kuat yang satu sama lain dan sifatnya saling menunjang. Salah satu aspek dalam proses tersebut tidak bisa dianggap tidak penting atau diabaikan. Secara keseluruhan, aspek-aspek tersebut merupakan sistem yang terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya.

Dalam penyusunan kelembagaan pengelola kawasan perkotaan yang ingin diwujudkan, disamping memperhatikan kaidah-kaidah tersebut diatas perlu tetap mengaplikasikan konsep Good Governance, Reinventing government dan Pemberdayaan Organisasi, agar Kelembagaan tersebut dapat menjalankan

tugas dan fungsinya secara berkualitas efektif dan efisien guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka kinerja manajemen perkotaan harus dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien agar dapat mengikuti dinamika pembangunan kota. Kondisi ini memerlukan kemampuan institusi dengan sistem manajemen yang handal dalam mengelola perkotaan. Dalam mewujudkan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan perkotaan yang dapat memberikan layanan yang efektif dan efisien perlu melihat beberapa aspek yang dibutuhkan sebuah organisasi yaitu :

1. Status Kelembagaan

Status Kelembagaan dalam pengelolaan kawasan perkotaan dapat berbentuk sebagai berikut:

a. Murni Aparatur Pemerintah Daerah

Kelembagaan Pengelola Kawasan Perkotaan dengan pola murni Aparatur Pemerintah Daerah ini merupakan bagian dari birokrasi pemerintah Daerah. Dimana kelembagaan ini tidak jauh berbeda dengan aparatur pemerintah lainnya yakni berkedudukan sebagai pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten dan bertanggung Jawab kepada Pimpinan Pemerintah Daerah. Pimpinan lembaga ini diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Sekretaris Daerah) dari Pegawai Negeri Sipil dengan syarat-syarat kepangkatan tertentu dan memiliki eselonisasi tertentu. Pembiayaan kelembagaan ini ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah. Personil dari kelembagaan ini adalah Pegawai negeri Sipil dan tenaga-tenaga honorer teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dari kelembagaan tersebut.

Kelembagaan dengan model semacam ini kurang menyertakan partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat. Aspirasi masyarakat hanya disalurkan ke lembaga legislatif (DPRD) Kabupaten. Model kelembagaan birokrasi kecenderungan bersifat rigid/ kurang fleksibel dalam mengantisipasi kebutuhan dan tuntutan yang berkembang di wilayah dan masyarakatnya. Kelembagaan ini lebih bersifat pelaksana tugas-tugas pimpinan bukan pemenuhan kebutuhan dan aspirasi wilayah dan masyarakatnya.

Dilihat dari Aspek Personil yang menjalankan kelembagaan ini, dimana dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah Daerah, dengan melihat kecenderungan yang ada dewasa ini tidak Aparatur pemerintah kurang profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak memiliki jiwa inovatif dan kreativitas yang tinggi. Kelembagaan ini dengan personil seperti itu akan mengalami kesulitan menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan kawasan perkotaan yang membutuhkan tenaga-tenaga profesional yang terampil, inovatif dan kreatif.

Dilihat dari Aspek Pembiayaan dengan kelembagaan semacam itu pembiayaan akan sangat tergantung alokasi dana yang diberikan Pemerintah daerah pada lembaga tersebut. Sedangkan kecenderungan rata-rata kemampuan Pemerintah daerah sangat terbatas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut kelembagaan tersebut dapat diberikan otoritas yang lebih dengan menempatkan kelembagaan tersebut seperti model kelembagaan pemerintah dengan pola Unit

Swadana. Kelembagaan tersebut selain mendapat subsidi dari Pemerintah daerah Kelembagaan tersebut memiliki sumber pendapatan lain yang legal untuk menopang pelaksanaan tugas dan fungsinya.

b. Semi Pemerintah Daerah

Kelembagaan dengan pola semi Pemerintah yaitu kelembagaan Pemerintah dengan membuka lebar unsur masyarakat dan swasta terlibat langsung (tidak hanya menjadi objek tetapi dapat menjadi subjek) dalam mengelola kelembagaan pengelola kawasan perkotaan ini. Bentuk kelembagaan seperti ini dapat bervariasi baik dari aspek pimpinan kelembagaan ini yang memungkinkan direkrut dari orang-orang profesional atau personil teknis dapat diambil dari luar birokrasi dengan sistem kontrak kerja dengan pemberian sistem penggajian tersendiri. Dari aspek pembiayaan selain mendapat bantuan dari Pemerintah daerah juga memiliki otoritas untuk menggali sumber pendapatan sendiri.

Keuntungan yang dimiliki pola kelembagaan seperti ini akan jauh lebih efektif, efisien dan profesional di banding dengan model pertama disamping memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi dalam mengantisipasi dan menjawab tuntutan dan kebutuhan di lapangan.

c. Kelembagaan Swasta Murni

Pengelolaan kawasan perkotaan diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta dalam hal ini seperti developer/pengembang yang dewasa ini seperti di kota-kota mandiri / pemukiman-pemukiman skala besar yang dilengkapi sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial yang komplit. Pola semacam ini akan cenderung bersifat profit oriented karena bertujuan untuk mendapatkan

keuntungan, eksklusivitas wilayah/daerah cenderung akan terjadi dengan pola tersebut. Pemerintah Daerah tidak memiliki otoritas untuk intervensi ke dalam organisasi ini sehingga akan mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Secara teoritis karena jenis barang/layanan yang disediakan Kelembagaan kawasan perkotaan lebih cenderung barang publik maka kelembagaan yang murni dilakukan oleh swasta dirasakan kurang tepat.

2. Tugas dan Fungsi Kelembagaan

Daerah yang telah menjadi Kawasan Perkotaan dewasa ini telah memiliki fungsi utama yakni sebagai:

- a. **Pemukiman** penduduk dengan menjamurnya kompleks-kompleks perumahan yang dibangun oleh pihak-pihak swasta.
- b. **Kawasan Industri**, kawasan perkotaan menjadi pusat industrialisasi, dengan munculnya industri-industri baik industri besar maupun industri kecil (home industri)
- c. **Perkantoran**, tempat berkedudukannya kantor-kantor swasta dan pemerintah baik kantor cabang maupun kantor pusat
- d. **Perdagangan dan Jasa**, adanya pusat-pusat perdagangan dan pasar baik skala besar seperti Mall dan supermarket maupun skala kecil Toko, Kios, mini market.
- e. **Fasilitas Umum dan Sosial**, terdapatnya Sekolah, tempat ibadah, tempat wisata.

Untuk menopang fungsi-fungsi itu semua maka sarana dan prasarana perkotaan mutlak menjadi tuntutan yang harus mendapat

perhatian dari berbagai kalangan tidak hanya pemerintah tapi juga kalangan swasta dan masyarakat. Tersedianya jalan, drainase, lingkungan dan taman, angkutan umum, Keamanan lingkungan, listrik, telepon, air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah dan lain sebagainya menjadi bagian yang utama di kawasan perkotaan.

Dengan melihat fungsi dan kebutuhan pelayanan di kawasan perkotaan maka Tugas dan fungsi Kelembagaan pengelola Kawasan Perkotaan dapat meliputi:

- a. Pemerintahan Umum;
 - yang menyangkut menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat,
 - Administrasi pemerintahan,
 - Pengaturan wilayah perkotaan, kependudukan dan tatanan kemasyarakatan.
- b. Pembinaan Masyarakat pada komunitasnya di wilayahnya,
- c. Pelayanan dan penyediaan fasilitas umum pada komunitasnya di wilayahnya,
- d. Koordinasi dan pengaturan pelayanan individual yang dilakukan oleh instansi lain atau oleh swasta, serta
- e. Pembangunan Daerah pada komunitasnya di wilayahnya; yang meliputi dari aspek perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengawasan.

3. Kewenangan Pokok Kelembagaan

Dengan memiliki tugas dan fungsi yang jelas, selanjutnya dalam penyusunan suatu kelembagaan perlu menentukan kewenangan yang seyogyanya dimiliki oleh kelembagaan

tersebut untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam penentuan kewenangan terlebih dahulu dapat menentukan kriteria Kewenangan yang dapat dilimpahkan ke kelembagaan kawasan perkotaan. Kriteria-kriteria itu adalah sebagai berikut :

- a. **Lokus dan mobilitas** suatu urusan yang ada dan hanya meliputi pada komunitas kawasan perkotaan.
- b. **Luas atau jenjang** derajat kepentingan dari suatu urusan itu sendiri, yang hanya menyangkut kepentingan kawasan perkotaan.
- c. **Kapasitas**, baik *finansial*, *SDM*, maupun *teknologi yang dimiliki* kawasan perkotaan;
- d. **Fungsi administratif** yang dapat dilaksanakan oleh Kawasan Perkotaan meliputi : fungsi kebijaksanaan, fungsi perencanaan dan alokasi, fungsi pendanaan, fungsi penerimaan, fungsi perizinan, fungsi pengelolaan, fungsi pemeliharaan, fungsi pemantauan atau pengawasan, dan fungsi kerjasama atau koordinasi.
- e. **Tingkat Efisiensi** dari penyelenggaraan kewenangan / pelayanan masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut. Apabila kebutuhan masyarakat di kawasan perkotaan sangat kecil maka akan lebih efisien kalau tetap diselenggarakan oleh Pemerintah kabupaten tidak oleh pengelola kawasan perkotaan.

Sebagian dari bidang kewenangan yang dilimpahkan ke Pengelola Kawasan Perkotaan bersifat utuh dan jelas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

4. Pelayanan Dasar Perkotaan

Dengan melihat fungsi-fungsi yang dimiliki kawasan perkotaan dan kebutuhan-kebutuhan kawasan perkotaan sekarang dan pada masa yang akan datang, maka pelayanan yang perlu tersedia di kawasan perkotaan terdiri dari dua jenis yaitu :

1. Pelayanan yang bersifat individual berupa :

- Pelayanan administrasi pemerintahan (adm. kependudukan, perizinan, dsb.)
- Pelayanan listrik
- Pelayanan telepon
- Pelayanan air bersih

2. Pelayanan yang bersifat Umum berupa :

- Pemeliharaan dan pembangunan jalan
- Pemeliharaan dan pembangunan Jaringan drainase
- Pemeliharaan dan pembangunan lingkungan dan taman
- Penyediaan Sarana angkutan umum
- Pelayanan Keamanan lingkungan
- Pelayanan Penanggulangan Kebakaran
- Pelayanan pengelolaan sampah
- Pelayanan pengelolaan limbah (khusus untuk kawasan industri)

Penutup

Dengan melihat permasalahan dan fenomena-fenomena yang timbul dalam pengelolaan kawasan perkotaan dewasa ini maka Pengelolaan kawasan perkotaan yang dilakukan secara profesional dengan memberikan layanan-layanan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat

merupakan suatu tuntutan yang harus direalisasikan. Permasalahan-permasalahan yang timbul di Kota-kota besar dewasa ini akan terulang pada kawasan perkotaan yang kelak menjadi kota bahkan bisa lebih parah, apabila tidak dilakukan penataan kawasan perkotaan semenjak dini.

Penataan Kelembagaan Pengelola kawasan perkotaan dapat dijadikan awal dalam penataan kawasan perkotaan secara menyeluruh karena Penataan Kawasan perkotaan merupakan suatu proses kegiatan yang berkesinambungan tidak hanya aspek kelembagaan tetapi juga menyangkut aspek-aspek yang lain baik aspek teknis maupun administratif. Penataan Kelembagaan kawasan perkotaan merupakan suatu rangkaian upaya untuk menciptakan tatanan organisasi yang lebih tertib, lincah, rasional, adaptif, efektif dan efisien sesuai dengan asas-asas normatif dan teoritis mengacu pada tuntutan yang berkembang di masyarakat. Dengan kata lain, penataan organisasi merupakan salah satu bukti nyata langkah reformasi sistem dan mekanisme penye-lenggaraan pemerintahan di daerah dengan tujuan menciptakan hubungan yang makin serasi antara pemerintah dengan masyarakat yang dilayani, atas dasar prinsip pemberdayaan, partisipasi masyarakat dan pemenuhan kebutuhan publik.

Dengan penataan Kelembagaan Pengelola kawasan Perkotaan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten, maka kondisi ideal yang ingin dicapai adalah terbentuknya Kelembagaan Pengelola Kawasan Perkotaan yang dapat mewujudkan kawasan perkotaan yang tertata dan terencana dengan baik, yang didukung kualitas SDM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamolekun, Ladipo dan Coralie Bryant (1996), *Governance Progress Report : The Africa Region Experience; Capacity Building and Implementation Division Study Paper*, Africa Technical Paper (Washington DC: World Bank).
- Bhatta, Gambhir (1996), *Capacity Building At The Local Level For Effective Governance: Empowerment Without Capacity Is Meaningless*; Paper presented in The International Conference On Governance Innovation: Building the Government - Citizen - Business Partnership; October 20-23 , Manila, Philippines.
- Flynn, Norman, *Public Sector Management*, (1990), London : Harvester Wheatsheaf
- Greenwood Jhon & Wilson David, *Public Administration in Britain*, London Unwinhyman, 1989
- Harmon, Michael M., and Richard T. Mayer, (1986), *Organization Theory for Public Administration*, Canada : Little, Brown & Company
- Hudson, Catheryn Seckler, (1955), *Organization and Management : Theory and Practice*, Washington DC : The American University Press
- Institute Of Governance (1996), *Trampling the Turf : Enhancing Collaboration in the Public Service of Canada*, a Case Study presented in The International Conference On Governance Innovation: Building the Government - Citizen - Business Partnership; October 20-23 , Manila, Philippines.
- LAN Perwakilan Jawa Barat (1995), *Penelitian tentang Penyempurnaan Sistem UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Bandung.
- LAN Perwakilan Jawa Barat (1998), *Penelitian tentang Pengembangan Model Penataan Organisasi Pemerintah Daerah Otonom Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Aparat Daerah dan Wilayah Dalam Menyelenggarakan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan*, BANDUNG
- LAN Perwakilan Jawa Barat (1999), *Penelitian tentang Identifikasi Kota-kota Baru*, Bandung.
- Stetzer, Donal Foster, *Special Districts in Cook Country : Toward a Geography of Local Government*, The University of Chicago Departement of Geography Research Paper No. 169, 1975)
- von Glinow, Mary Ann, (1988), *The New Professionals : Managing Today's High-Tech Employess*, Ballinger Publishing Company.
- UNDP (1996), *Process Consultation: Systemic Improvement of Public Sector Management*, presented in the International Conference on Governance Innovation: Building the Government - Citizen - Business Partnership; October 20-23, Manila, Philippine